



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
Sifat Rapat : *Terbuka*  
Hari/tanggal : Senin, 26 September 2011  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : 1. Melanjutkan Rapat tanggal 14 September 2011 mengenai  
Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012 Kementerian  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.  
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 34 orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI  
4 orang Izin.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI menyetujui pagu sementara/Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebesar **Rp. 4.162.970.267.000,-** (*Empat Trilyun Seratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) pada RAPBN Tahun anggaran 2012.

2. Komisi IX DPR-RI memahami dan akan memperjuangkan usulan tambahan Anggaran Kemenakertrans RI Tahun 2012 sebesar **Rp 3.026.775.000.000** (*Tiga Trilyun Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) pada Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
3. Komisi IX DPR-RI mendorong Kemenakertrans RI agar meningkatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2010 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011.
4. Komisi IX DPR RI bersama Kemenakertrans RI akan melakukan pendalaman dan penajaman alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan pada semua satuan kerja Kemenakertrans RI pada hari Senin, 26 September 2011.
5. Sebelum dibuka moratorium dengan negara Malaysia Kemenakertrans RI harus melakukan konsultasi dengan Komisi IX DPR-RI.
6. Komisi IX DPR-RI meminta kepada Sekjen Kemenakertrans RI untuk menyerahkan dan menjelaskan data Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN) Tahun 2012
7. Komisi IX DPR-RI mendorong Kemenakertrans RI untuk mengusahakan dan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait agar uang pesangon dan dana pensiun tenaga kerja perusahaan BUMN untuk dialokasikan melalui dana APBN

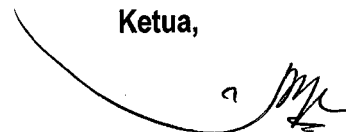
Rapat diakhiri pada pukul 12.15 WIB

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI,**



**Drs. MUHAIMIN ISKANDAR, MSI**

**Jakarta, 26 September 2011**  
**PIMPINAN KOMIS IX DPR-RI**  
**Ketua,**



**dr. RIBKA TJIPTANING**